



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto

Telp. (0281) 625893

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk menyusun 2 (dua) Dokumen Perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja SKPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja SKPD menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum SKPD.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kependudukan dan KB;
4. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
10. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
11. PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. PP No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

15. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
17. PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013;
22. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Permendagri 54 Tahun 2010 Juklak PP 8 Tahun 2008
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas ini adalah agar tersedianya pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan. Dengan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan bidang Keluarga Berencana.

D. Sistematika Penulisan

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan memuat; Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan |
| Bab II | Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, menjelaskan tentang hasil kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, analisa kinerja pelayanan dan review terhadap rancangan awal RKPD |
| Bab III | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD |
| Bab IV | Penutup |

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Gambaran Kondisi Umum Tahun lalu

Secara geografis Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Jawa Tengah terletak diantara: 108° 39'17" - 109° 27' 15" Bujur Timur dan 7° 15' 05" - 7° 37' 10" Lintang Selatan. Adapun jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah 1.605.579 orang (Banyumas Dalam Angka). Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan antara lain adalah kegiatan yang ada bergantung pada pelaksanaan kegiatan pada tingkat provinsi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, serta upaya efisiensi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Apabila ditinjau dari SPM yang ada, maka capaian SPM serta capaian dapat dijelaskan dalam Tabel berikut :

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	TARGET CAPAIAN (%)			Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	SPM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
I.	Penanganan Pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak						
1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%		100%	100%	100%	
II.	Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan						
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/ PKT di RS			100%	100%	100%	
III.	Rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan						
3.	Cakupan layanan Rehabilitasi sosial yang			75%	75%	75%	

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	TARGET CAPAIAN (%)			Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu						
4.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu			75%	75%	75%	
IV.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan			75%	75%	75%	
5.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			75%	75%	75%	
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			75%	75%	75%	
V.	Pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan			75%	75%	75%	
7.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			75%	75%	75%	
8.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			75%	75%	75%	
B.	SPM BIDANG KB DAN KS						
I.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)						

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	TARGET CAPAIAN (%)			Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1.	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun			1,11	1,21	1,72	
2.	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif			73,81	74,24	78,02	
3.	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi			47.491	46.240	32.439	
4.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB			82,41	80,35	79,05	
5.	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB			83,64	87,34	80,71	
6.	Ratio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) desa/ kelurahan			2,75	2,80	2,09	
7.	Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/ kelurahan			1	1	1	
II.	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi						
8.	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun			3	3	3	
III.	Penyediaan Informasi data mikro						
9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan 100% setiap tahun			100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi

Dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak isu penting permasalahan yang ada antara lain :

1. Belum optimalnya penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Masih rendahnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
 3. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 4. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu Tatalaksana KIP/A dan PPT/ PKT di RS masih rendah
 5. Masih rendahnya penanganan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 6. Masih rendahnya Cakupan layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
 7. Masih rendahnya cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
 8. Belum optimalnya sosialisasi penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 9. Masih rendahnya cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 10. Masih rendahnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
 11. Belum tersosialisasinya pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 12. Masih rendahnya cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 13. Masih rendahnya cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- Permasalahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :
1. Belum optimalnya Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)
 2. Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun
 3. Masih rendahnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
 4. Masih rendahnya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
 5. Masih rendahnya cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
 6. Masih rendahnya cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
 7. Masih rendahnya Ratio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) desa/ kelurahan
 8. Masih rendahnya kualitas pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) walaupun rasionya telah memenuhi 1 petugas di setiap desa/ kelurahan
 9. Belum optimalnya Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
 10. Masih rendahnya cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun
 11. Belum optimalnya Penyediaan Informasi data mikro
 12. Masih rendahnya cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan setiap tahun

Pada sisi yang lain secara intern Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana masih menghadapi beberapa kendala antara lain :

- a. Masih terbatasnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas, yaitu untuk penanganan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan maupun petugas lapangan penyuluh KB.
- b. Masih terbatasnya sarana prasarana dalam menggerakkan masyarakat khususnya dalam bidang pemberdayaan
- c. Besarnya beban kerja karena terdapat beberapa kegiatan dana APBD Provinsi, dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Berkaitan dengan kebutuhan penanganan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang keluarga berencana dalam rancangan awal RKPD sebenarnya sudah cukup memadai, namun beberapa program belum sinkron dengan program pada tingkat provinsi, hal ini karena sinkronisasi program dilaksanakan pada tahun berjalan. Disamping itu program dan kegiatan yang ada belum bisa mendukung sepenuhnya pencapaian standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya tinjauan ulang standar tersebut dengan kondisi dan kemampuan penganggaran di daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan OPD yang bertugas secara langsung bersentuhan dengan masalah nasional yaitu pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Bahwa masalah kemiskinan dan pengangguran sebagai masalah nasional perlu ditangani secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi di tingkat Provinsi maupun Pusat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan sesuai misi I Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan misi II Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak serta mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak yang akan dicapai dalam renja ini antara lain :

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik yang menggunakan MKJP maupun Non MKJP
3. Penguatan tata kelola dan pengembangan bidang KB
4. Meningkatkan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan
6. Mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan
7. Meningkatkan perlindungan anak

Adapun sasaran yang ingin dicapai sesuai misi I dan II adalah :

1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS/Wanita Usia Subur (15-49 tahun)
2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR /Contraception Prevalency Rate))
3. Menurunnya Laju Pertumbuhan penduduk (LPP)
4. Meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative dan eksekutif
5. Meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja
6. Menurunnya angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan
7. Menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak

Adapun Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 selengkapnya sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Wajib	Prioritas Nasional (Kode)	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah (Kab/ Kota)	Indikator Kinerja Program / Sasaran / Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Prakiraan Maju Tahun 2018			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ APBD Kab	APBD Prov	APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1 6	Perencanaan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Tercapainya Pelayanan Administrasi Berkantoran			1,330,000,000	0	0		1,330,000,000
1 6 1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	200,000,000	0	0		200,000,000
1 6 1 3	Penyediaan bahan logistik kantor	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	450,000,000	0	0		450,000,000

1	6	1	4	Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Mubangun Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1	6	1	5	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Mubangun Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	230,000,000	0	0	0	230,000,000
1	6	1	6	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Mubangun Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	350,000,000	0	0	0	350,000,000
1	6	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Terpenuhiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor			590,000,000	0	0	0	590,000,000

1	6	2	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	0	0	150,000,000	12 bulan	150,000,000
1	6	2	2	Pemeliharaan rutin gedung kantor	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	0	0	200,000,000	12 bulan	200,000,000
1	6	2	3	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	0	0	175,000,000	12 bulan	175,000,000
1	6	2	4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Kantor Bapermaspkb	Kabupaten Banyumas	12 bulan	0	0	65,000,000	12 bulan	65,000,000

1	11	16	6	Peningkatan kapasitas dan jaringan keberdayaan perempuan dan anak	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di berbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Bertelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Terbentuknya 2 Kecamatan Layak Anak, fasilitas tim gugus tugas KLA, fasilitas forum anak Banyumas	Kabupaten Banyumas	Terbentuknya 2 Kecamatan Layak Anak, fasilitas tim gugus tugas KLA, fasilitas forum anak Banyumas	100,000,000	0	0	0	100,000,000	Terbentuknya 2 Kecamatan Layak Anak, fasilitas tim gugus tugas KLA, fasilitas forum anak Banyumas	100,000,000	
1	11	16	7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di berbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Bertelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Tim Focal Point, Tim Kelompok Kerja PUG, Forum Komunikasi PUG, Tim ARG	Kabupaten Banyumas	Tim Focal Point, Tim Kelompok Kerja PUG, Forum Komunikasi PUG, Tim ARG	100,000,000	0	0	0	100,000,000	Tim Focal Point, Tim Kelompok Kerja PUG, Forum Komunikasi PUG, Tim ARG	100,000,000	
1	11	16	8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di berbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Bertelanjutan	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Tingkat Pemerintahan Di Melainkan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Forum data, Seminar, 40 Buku SIGA, Sosialisasi SIGA, Pengembangan KIE PPPA	Kabupaten Banyumas	Forum data, Seminar, 40 Buku SIGA, Sosialisasi SIGA, Pengembangan KIE PPPA	100,000,000	0	0	0	100,000,000	Forum data, Seminar, 40 Buku SIGA, Sosialisasi SIGA, Pengembangan KIE PPPA	100,000,000	
1	11	17	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perindungan Perempuan				Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan generasi penerus, termasuk pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan				500,000,000	0	0	0	500,000,000		500,000,000

1	11	17	1	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pedampingan Korban KDRT	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Pendampingan Korban KDRT	Kabupaten Banyumas	200 Orang	100,000,000	0	0	0	200 Orang	100,000,000
1	11	17	1	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	Tersosialisasinya Kebijakan bagi Ex. Naker perempuan, Pengurus Perusahaan Pengarah tenaga Kerja Ind Swasta (PPTKIS) dan Calon TKW	Kabupaten Banyumas	100 Orang	100,000,000	0	0	0	100 Orang	100,000,000
1	11	17	1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	40 orang Bina keluarga TKI. 1 lokasi Kecamatan sayang ibu dan 1 lokasi desa Sayang Ibu, 40 orang perempuan lansia	Kabupaten Banyumas	40 orang Bina keluarga TKI. 1 lokasi Kecamatan sayang ibu dan 1 lokasi desa Sayang Ibu, 40 orang perempuan lansia	100,000,000	0	0	0	100,000,000	

1	11	6	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu Melalui Pengurangan Beban Masyarakat Miskin, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Serta Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil Bagi Masyarakat Miskin	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	80 orang pengurus LPPTK	Kabupaten Banyumas	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
1	11	17	8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di berbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	200 Kasus	Kabupaten Banyumas	150,000,000	0	0	0	150,000,000
1	11	18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				Meningkatnya peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan pender	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	

1	11	18	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	53 Organisasi Perempuan	Kabupaten Banyumas	300,000,000	0	0	0	300,000,000	53 Organisasi Perempuan	0	Kurangnya peran serta organisasi perempuan dalam program PPPA	300,000,000
1	12			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana														
1	12	15	15					Meningkatnya peran stakeholder dan masyarakat dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Kabupaten Banyumas	2,400,000,000	0	0	0	1,800,000,000	60 Orang	0		1,800,000,000
1	12	15	2	Pelayanan KIE	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Menajamkan Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	600 Orang	Kabupaten Banyumas	100,000,000	0	0	0	100,000,000	60 Orang	0		100,000,000
1	12	15	4	Promosi Pelayanan Khuba	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Menajamkan Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	100 Orang	Kabupaten Banyumas	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100 Orang	0		100,000,000

1	12	15	5	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bida.yg Dan Layanan Sosial Secara Berkelanjutan	Menjajamkan Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	160 Orang	Kabupaten Banyumas	160 Orang	100,000,000	0	0	0	Belum optimalnya pembinaan teknis Penyuluh KB	160 Orang	100,000,000
1	12	15	6	Pengadaan sarana mobilitas tm KB keliling	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu Melalui Kemiskinan Dan Pengurangan Beban Masyarakat Miskin, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Serta Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil Bagi Masyarakat Miskin	Menjajamkan Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	4 Kegiatan	Kabupaten Banyumas	4 Kegiatan	1,500,000,000	0	0	0		4 Kegiatan	1,500,000,000
1	12	15	2015	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Belal Penyuluhan KB	Membuat Pemerintah Selaku Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya (2)	Pemantapan Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik	Memantapkan Kualitas Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Memperkuat Birokrasi Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Dan Melakukan Reformasi Birokrasi Secara Berkelanjutan Termasuk Penataan Kelembagaan	3 Kecamatan (Gumelar, Patikraja dan Baturaden)	3 Kecamatan (Gumelar, Patikraja dan Baturaden)	3 Kecamatan (Gumelar, Patikraja dan Baturaden)	600,000,000	0	0	0			0

1	12	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di berbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Menajamkan Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.	Kabupaten Banyumas	150 Orang	50,000,000	0	0	0	150 Orang	50,000,000	50,000,000
1	12	16	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)				150 Orang	Kabupaten Banyumas	150 Orang	50,000,000	0	0	0	150 Orang	50,000,000	50,000,000
1	12	17	Program pelayanan kontrasepsi				Tersedianya alat dan obat kontrasepsi bagi pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 (Pra S dan KS I)			1,575,000,000	0	0	0		1,775,000,000	
1	12	17	Pelayanan Konseling KB	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di berbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Menajamkan Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	500 Akseptor KB	Kabupaten Banyumas	969 Akseptor KB	350,000,000	0	0	0	869 Akseptor KB	350,000,000	

1	12	17	2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Secara Berkelanjutan	Menajamkan Program Dan Kegiatan Peningkatan Kemiskinan Dan Pengguguran	Kegiatan Fasilitas pra dan momentum : TNI Manunggal KB Kes Bhayangkara KB Kes Harganas Kesatuan Gerak PKK	Kabupaten Banyumas	40.925 peserta KB	500,000,000	0	0	0	140.000 peserta KB Aktif	700,000,000
1	12	17	3	Pengadaan alat kontrasepsi	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Secara Berkelanjutan	Menajamkan Program Dan Kegiatan Peningkatan Kemiskinan Dan Pengguguran	200 Akseptor	Kabupaten Banyumas	200 Akseptor	225,000,000	0	0	0	200 Akseptor	225,000,000
1	12	17	4	Pelayanan KB medis operasi	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	200 Akseptor	Kabupaten Banyumas	946 Akseptor	500,000,000	0	0	0	946 Akseptor	500,000,000
1	12	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				Meningkatnya kualitas IAP (PPKBD dan Sub PPKBD) yang aktif melaksanakan Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) KB.			100,000,000	0	0	0		100,000,000

1	12	21	1	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa sebanyak 54 kelompok	Kabupaten Banyumas	150 Orang	0	0	100,000,000	150 Orang	100,000,000
1	12	22	22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				Bertambahnya kelompok dan kualitas BKB percontohan di setiap kecamatan.			0	0	100,000,000		100,000,000
1	12	22	1	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kelompok BKB	Kabupaten Banyumas	150 Orang	0	0	100,000,000	150 Orang	100,000,000
1	12	23	0	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga				Meningkatnya kualitas kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL dan LUBAZS)			0	0	300,000,000		300,000,000
1	12	23	1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kelompok Bina Keluarga yang belum terlatih	Kabupaten Banyumas	100 Orang	0	0	150,000,000	100 Orang	50,000,000

1	12	23	1	Pembinaan Kelompok UPPKS	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan kader UPPKS	Kabupaten Banyumas	100 Orang	150,000,000	0	0	0	100 Orang	50,000,000
1	12	24	1	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya jumlah dan kualitas kelompok bina keluarga balita (BKB).	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan kader UPPKS	Kabupaten Banyumas	100 orang	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100 orang	50,000,000
1	12	24	1	Pengajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kelompok BKB	Kabupaten Banyumas	100 orang	50,000,000	50,000,000	0	0	100 orang	50,000,000
1	12	24	1	Pengajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Kelompok BKB	Kabupaten Banyumas	100 orang	50,000,000	50,000,000	0	0	100 orang	50,000,000
1	12	25	1	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Meningkatnya cakupan dan kualitas data mikro keluarga dan data hasil pencapaian program	Meningkatnya keterampilan dan kemampuan kader UPPKS	Kabupaten Banyumas	100 orang	300,000,000	300,000,000	0	0	0	100 orang	300,000,000

25	2	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan data/Informasi Bidang KB	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia (5)	Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diberbagai Bidang Dan Layanan Sosial Dasar Masyarakat Secara Berkelanjutan	Memantapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Peningkatan Jangkauan Dan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan	Tertalkannya Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang KB	Kabupaten Banyumas	41 Laporan	150,000,000	0	0	41 Laporan	150,000,000	8,195,070,000
TOTAL PAGU										0	0		8,195,070,000	

Purwokerto, Desember 2017

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MELINDUNGKAN ANAK (DPPKBP3A)
KABUPATEN BANYUMAS



Dis. H. TAEFUR AROFAT, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19600420 198104 1 001

BAB IV
PENUTUP

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu diperlukan partisipasi dan dukungan pihak-pihak yang terkait.

Disamping itu Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rencana Kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya mengatasi angka kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Purwokerto, 2017
Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Banyumas
Drs. H. TAEFUR AROFAT, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
19600420 198104 1 001

